

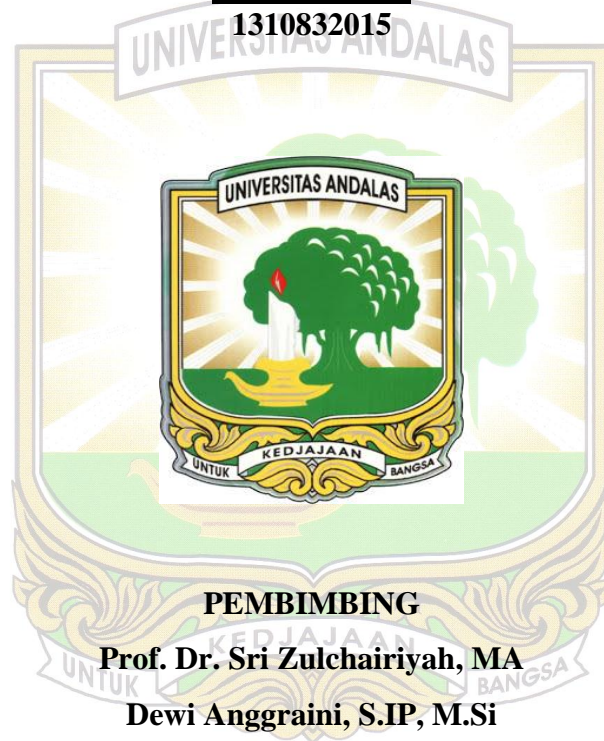
**Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Padang
Periode 2014-2017**

SKRIPSI

Oleh :

Peba Rasaki

1310832015



PEMBIMBING

Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, MA

Dewi Anggraini, S.IP, M.Si

**ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRAK

Peba Rasaki (1310832015) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing I Prof.Dr.Sri Zulchairiyah, MA dan Pembimbing II Dewi Anggraini, S.IP, M.SI. Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Padang Periode 2014-2017.

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat terkait tata tertib dan kode etik baik di DPR RI maupun di DPRD, berbagai kelompok masyarakat di Kota Padang yang kritis terhadap badan legislatif mempertanyakan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Padang, adanya kasus tebang pilih dalam memproses Anggota DPRD yang melanggar kode etik, hanya serius pada kasus tertentu saja.

Tujuan dari penelitian untuk menjelaskan penyelesaian Badan Kehormatan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib Anggota DPRD Kota Padang kemudian menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Badan Kehormatan dalam melaksanakan fungsinya di DPRD Kota Padang pada periode 2014-2017. Penelitian ini menggunakan teori neo-institusional Richard W.Scott, menggunakan metode deskriptif analisis, lokasi penelitian di DPRD Kota Padang, dengan menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melewati proses wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa dari berbagai macam kasus pelanggaran kode etik yang ada di DPRD Kota Padang, Badan Kehormatan sudah melaksanakan fungsinya dengan maksimal terlihat dari aduan dugaan pelanggaran kode etik 5 diantaranya sudah diproses, hanya 1 kasus yang belum diselesaikan Badan Kehormatan.

Adapun hambatan-hambatan yang membuat Badan Kehormatan sulit profesional dalam menegakkan kode etik di DPRD Kota Padang diantaranya tarik-menarik kepentingan didalam Badan Kehormatan, tumpulnya aturan hukum dalam menegakkan kode etik, Badan Kehormatan bukan prioritas yang utama, tidak proaktif dalam menegakkan kode etik, tidak adanya aturan khusus dalam rekrutmen Anggota Badan Kehormatan, prosedur pengaduan yang rumit, dan sikap toleransi antar sesama Anggota DPRD.

Kata Kunci : Pelanggaran Kode Etik, DPRD Kota Padang, Badan Kehormatan.

ABSTRACT

Peba Rasaki (1310832015) Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Supervisor I Prof.Dr.Sri Zulchairiyah, MA and Advisor II Dewi Anggraini, S.IP, M.SI. Thesis Title: Implementation of Honor Council Parliament of Padang City Period 2014-2017.

Honor Council as one of the tools of parliament is an institution related to the honor of the representatives of the people related to the rules and code of ethics both in the House of Representatives and the parliament, various community groups in Padang critical to the legislative body questioned Honor Council Parliament of Padang city Selected logging cases in the processing of Parliament Members who violate the code of ethics are only serious in certain cases.

The purpose of the research to explain the settlement of Honor Council in handling cases of alleged violation of code of ethics and discipline of Parliament Member of Padang City then explain the factors that prevent Honor Council in performing its function in DPRD Padang City in period 2014-2017. This research uses the neo-institutional theory of Richard W.Scott, using descriptive method of analysis, research location in Parliament of Padang City, using primary and secondary data, data collection techniques through the process of interview and documentation.

This research concludes that from various cases of violation of code of ethics in Parliament of Padang City, Honor Council has performed its function with maximum seen from allegations of violation of code of ethics 5 of which have been processed, only 1 case that has not been settled by Honor Council.

The obstacles that make Honor Council difficult for professionals to enforce the code of ethics in the Parliament of Padang City include the attraction of interest within the Honor Council, the dull rule of law in enforcing the code of ethics, Honor Council is not the main priority, not proactive in enforcing the code of conduct, the absence of special rules in the recruitment of Honor Council Members, complicated grievance procedures, and tolerance among members of the Parliament.

Keywords: Violation of Code Ethic, Parliament of Padang City, Honor Council.